

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat faktor ini merupakan tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas. Dari keempat faktor ini kita bisa menilai apakah implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas berjalan sesuai arahan kebijakan ataukah tidak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan melalui surat edaran dan rapat koordinasi oleh Dinas Pendidikan daerah Kabupaten Padang Lawas dengan pengawas. Dalam hal pengkomunikasian kebijakan beban kerja pengawas SMA maupun kebijakan lain, Dinas Pendidikan daerah Kabupaten Padang Lawas belum melakukan sosialisasi melalui pelatihan maupun workshp untuk pengawas sekolah.

Meskipun masih melalui surat edaran maupun rapat koordinasi, kejelasan informasi tentang kebijakan beban kerja pengawas dapat dipahami secara utuh oleh pelaksana kebijakan. Pengawas SMA paham dalam penyusunan program kerja serta membagi jam kerja sesuai dengan acuan Permenpan RB

No.21 tahun 2010 pasal 6. Selanjutnya untuk faktor konsistensi dalam implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas, Dinas Pendidikan tidak melakukan perubahan aturan yang mengatur jam kerja pengawas sekolah. Tidak membuat peraturan daerah terkait jam kerja pengawas sekolah yang disesuaikan dengan kondisi daerah, masih merunut pada peraturan pusat serta tidak ada kebijakan lain oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan isi Permenpan RB pasal 6 tentang beban kerja pengawas.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas pihak dinas pendidikan belum menetapkan beberapa personil menjadi tim pelaksana. Dari segi sumber daya staf dalam pengkomunikasian kebijakan beban kerja pengawas di Kabupaten Padang lawas dapat dikatakan sudah memadai baik dari segi kualifikasi maupun kemampuan IT. Sementara untuk ketersediaan informasi di lingkungan penyampai kebijakan masih kurang memadai. Kebanyakan pengawas masih mencari informasi sendiri, baik dari rekan-rekan sesama pengawas, rekan pengawas dari daerah lain maupun dari internet. Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan, dalam pelaksanaan implementasi beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas, dinas mampu menjalankan wewenang secara efektif. Selanjutnya dari segi sarana dan prasarana masih belum memadai, tetapi sudah direncanakan dan dimasukkan dalam anggaran APBD tahun ini.

3. Disposisi

Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara umum sikap pelaksana kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas ini memiliki sikap menerima dan mendukung kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas sudah cukup baik. SOP yang digunakan mengacu ke Permenpan RB No.21 tahun 2010 dan buku kerja pengawas sekolah karena dalam hal ini tidak ada Peraturan Daerah terkait dengan pengaturan beban kerja pengawas. Pembagian tugas dan tanggung jawab diantara sesama pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas juga berjalan dengan baik. Adanya hubungan hirarki dan pembagian tanggung jawab yang tegas diantara pelaksana kebijakan menyebabkan struktur organisasi menjadi efektif.

B. IMPLIKASI

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pemenuhan beban kerja bagi pengawas seperti yang dipersyaratkan dalam Permenpan RB No.21 tahun 2010 pasal 6 sangat mutlak diperlukan bagi terwujudnya kontroling pengawas terhadap kinerja guru dan kepala sekolah dilapangan yang berdampak pada kemajuan mutu

pendidikan. Fungsi pengawasan dan kontrol internal dari atasan langsung yang belum optimal menyebabkan banyak peluang dalam pelaksanaan tugas yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya seperti yang telah digariskan oleh kebijakan. Untuk itu perlu perbaikan dalam proses implementasi kebijakan tersebut oleh pihak dinas pendidikan maupun pihak-pihak terkait dengan kebijakan tersebut.

Dinas pendidikan diharapkan bisa lebih tegas dalam menindak pengawas yang tidak melaksanakan beban kerjanya secara maksimal. Selain hal tersebut, beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam implementasi kebijakan beban kerja pengawas antara lain:

1. Perlunya kerjasama antara dinas pendidikan dengan BKD, menjalin komunikasi dan koordinasi dalam hal aturan pemenuhan beban kerja pengawas.
2. Menyediakan sumber daya antara lain dana, personel, peralatan dan pemanfaatan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan dan pemanfaatannya dilakukan dengan efektif dan efisien.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan baik yang dilakukan dinas terkait maupun pelaksana kebijakan lainnya sehingga capaian kinerja dan beban kerja pengawas dapat diketahui sedini mungkin untuk dievaluasi.
4. Meningkatkan pembinaan kepada pelaksana implementasi kebijakan beban kerja pengawas, sehingga dapat ditumbuhkan keteguhan sikap yang kuat untuk mengimplementasikan Permenpan RB No.21 tahun 2010 pasal 6 tentang beban kerja pengawas.

5. Menyusun petunjuk pelaksanaan, sistem dan prosedur operasional secara rinci, sehingga memberikan kejelasan kepada aparat yang diberi tugas mengenai apa yang harus dilakukannya.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan berbagai permasalahan yang tentunya perlu dilakukan langkah antisipasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan Permenpan RB No.21 tahun 2010 pasal 6 tentang beban kerja pengawas SMA dan sebagai upaya perwujudan pengembangan dan pemberdayaan pengawas di Kabupaten Padang Lawas.

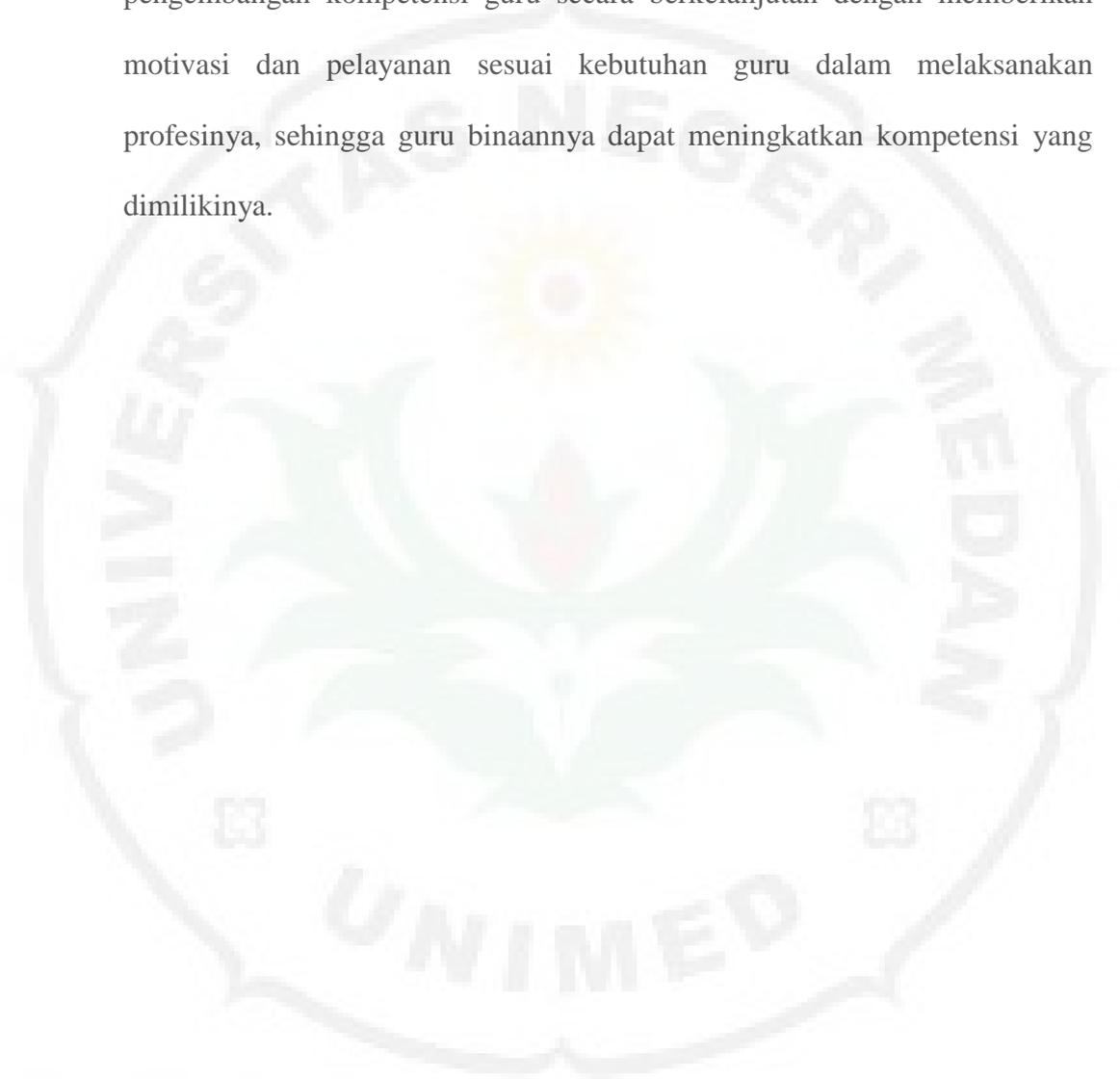
Adapun rekomendasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas perlu mengadakan sosialisasi kebijakan dalam bentuk pelatihan, bimtek ataupun workshop terhadap pengawas sekolah dalam hal kebijakan apapun yang akan diberlakukan kepada pengawas sebagai pelaksana. Dengan adanya sosialisasi yang seperti ini diharapkan akan menumbuhkan rasa penerimaan, sambutan dan penghargaan pengawas terhadap kebijakan tersebut.
2. Dinas pendidikan Kabupaten Padang Lawas perlu memperhatikan dan melengkapi sarana serta prasarana bagi pengawas dalam menunjang keterlaksanaan beban kerjanya. Dilihat dari kondisi kantor pengawas di kabupaten Padang Lawas masih sangat memprihatinkan bagi kenyamanan pengawas dalam bekerja (dapat dilihat pada lampiran). Kondisi kantor pengawas yang masih menumpang di salah satu gedung sanggar pelatihan itu

hendaknya menjadi perhatian Dinas Pendidikan daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai Induk satuan pengawas sekolah. Disamping itu, melihat jarak tempuh pengawas SMA ke lokasi sekolah binaan yang tergolong jauh, sudah selayaknya pengawas mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dalam mendukung keterlaksanaan beban kerjanya. Mengingat pengawas sekolah juga adalah pejabat fungsional.

3. Perlu adanya tenaga atau aktor yang bekerja secara khusus dalam menangani pengawas sekolah baik menyangkut pemberdayaan atau peningkatan profesionalismenya. Dinas daerah Kabupaten Padang Lawas membuat bidang atau seksi yang secara ketenagaan menjadi pengelola langsung dalam kegiatan kepengawasan. Bidang atau seksi inilah yang akan terus melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja pengawas.
4. Di kabupaten Padang Lawas belum ada pengawas rumpun mata pelajaran, untuk itu dinas pendidikan daerah Kabupaten Padang Lawas perlu segera memenuhi angka kebutuhan pengawas rumpun mata pelajaran demi keterlaksanaan beban kerja yang optimal.
5. Koordinator pengawas sebagai pemimpin perlu terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas sekolah dalam melaksanakan beban kerja sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Permenpan RB No.21 tahun 2010.
6. Pengawas sekolah dituntut untuk menyadari pentingnya tanggung jawab dalam memenuhi beban kerja yaitu melaksanakan tupoksinya sebagai pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Sekaligus berupaya melakukan pembinaan dan

pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan dengan memberikan motivasi dan pelayanan sesuai kebutuhan guru dalam melaksanakan profesinya, sehingga guru binaannya dapat meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.



THE
Character Building
UNIVERSITY